



DPRD Sulbar dan Pemprov Sulbar Sepakati Perubahan Susunan Perangkat Daerah dan Penetapan KUA-PPAS 2024.

MAMUJU, Terbitsulbar.com – DPRD Sulbar melaksanakan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2024 dan perubahan Perda perubahan perangkat daerah.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi yang dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris, dan diikuti seluruh kepala OPD dan anggota DPRD Sulbar lainnya. Selasa, ((29/9/2023).

Ketua DPRD Sulbar, Sitti Suraidah Suhardi mengatakan, seluruh proses telah melalui tahapan yang cukup panjang, namun berkat kerja keras seluruh pihak sehingga pembahasan dapat diselesaikan.

Suraidah menuturkan, hal ini tentu akan menjadi pembahasan selanjutnya bagi DPRD. Olehnya itu, ketua DPRD Sulbar berharap semua OPD pada saat pembahasan tidak ada yang keluar daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris mengaku bersyukur karena dapat mengikuti rapat paripurna terkait KUA PPAS 2024 dan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas perda nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Sulbar.

“Terimakasih atas seluruh proses yang telah dilakukan oleh ketua dan anggota DPRD, berusaha menyempurnakan prosedur dan kualitas pembahasan KUA PPAS 2024,” kata Idris.

Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi, hal ini merupakan hasil dari sinergitas sekaligus menunjukkan bahwa fungsi legislatif dan eksekutif telah berjalan harmonis.

Sesuai arahan kebijakan pada RPD 2023 -2026 maka tema pembangunan 2024 diarahkan pada peningkatan ekonomi inklusif. Dengan harapan target pembangunan dapat dicapai.

Target pertumbuhan ekonomi di angka 5,1 persen sudah kita lampau Juli 2023 6,42 lebih tinggi dari Nasional. Kemiskinan turun menjadi 20,25 persen, tahun lalu kit masih diangka 11 persen. IPM sebesar 69,36 persen sedikit lagi sampai 70 persen ini sudah mendekati nasional, Pengangguran terbuka 1,78 persen. Indeks gini ratio 0,346 masih tinggi.

Dalam rapat Paripurna tersebut, Pemprov bersama DPRD Sulbar juga menyepakati Nota kesepahaman bersama KUA PPAS merupakan pedoman dan landasan dalam melakukan penyesuaian nota keuangan APBD 2024.

“Untuk itu OPD akan segera menyusun rencana kerja dan RKA setelah pendatang ini. Kemudian paripurna juga menyepakati persetujuan APBD pokok 2024 yang disusun dalam kondisi yang kurang menggembirakan,” kata Idris.

Selain itu terdapat empat perangkat daerah yang dilakukan penyesuaian, nomenklatur. Seluruh OPD pun diharapkan dapat bekerja lebih maksimal lagi.

“Direktur Rumah sakit diangkat dari pejabat struktural, kemudian Kesbangpol untuk melakukan penertiban dengan baik, selanjutnya itu Tapem yang kita keluarkan masuk ke Perkim, kemudian DPMPTSP itu semua tidak adalagi pejabat administrator selain Sekretaris dan Kasubag Kepegawaian,” ucap Idris. (ADV)